

# **PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO**

**MENURUT PENGELUARAN**

**KOTA TIDORE KEPULAUAN  
2014-2018**



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KOTA TIDORE KEPULAUAN**

# **PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO**

**MENURUT PENGELUARAN**

**KOTA TIDORE KEPULAUAN  
2014-2018**



**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO  
KOTA TIDORE KEPULAUAN  
MENURUT PENGELUARAN  
2014- 2018**

Nomor Publikasi : 82720.1905  
Katalog BPS : 9302020.8272

Ukuran Buku : 21 x 29,7 cm  
Jumlah Halaman : viii + 52 halaman

Naskah:  
Badan Pusat Statistik Kota Tidore Kepulauan

Gambar Kulit:  
Badan Pusat Statistik Kota Tidore Kepulauan

Diterbitkan Oleh:  
Badan Pusat Statistik Kota Tidore Kepulauan

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

## **TIM PENYUSUN**

### **Penanggungjawab Umum:**

Ir. Salahuddin, M.Si

### **Penyunting:**

Lusi Dwi Rianti, SST

### **Penulis:**

Bimo Aji Dimas Danindro, SST

### **Pengolah Data:**

Bimo Aji Dimas Danindro, SST

### **Gambar Kulit:**

Bimo Aji Dimas Danindro, SST

# KATA PENGANTAR

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Tidore Kepulauan merupakan salah satu indikator strategis ekonomi yang dapat digunakan untuk perencanaan maupun kinerja pembangunan di Kota Tidore Kepulauan. Publikasi ini secara khusus membahas mengenai PDRB Kota Tidore Kepulauan dari sisi pengeluaran/permintaan akhir. Data PDRB Kota Tidore Kepulauan dalam publikasi ini menggunakan tahun dasar 2010 dan konsep sesuai *System of National Accounts 2008* yang direkomendasikan *United Nations*.

Tidak lupa juga saya memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam mewujudkan publikasi ini. Demikian pula kepada instansi pemerintah dan lembaga/perusahaan swasta yang telah memberikan dukungan data bagi penyusunan publikasi ini.

Kami menyadari bahwa publikasi ini masih memerlukan banyak penyempurnaan. Oleh karena itu, setiap masukan yang bersifat konstruktif sangat kami hargai demi penyempurnaan isi publikasi di kemudian hari. Akhir kata semoga publikasi dimanfaatkan sebaik-baiknya.

Tidore, September 2019

Kepala BPS Kota Tidore Kepulauan

**Ir. Salahuddin, M.Si.**

# Daftar Isi

KATA PENGANTAR .....	iv
Daftar Isi .....	v
Daftar Tabel .....	vi
Daftar Gambar .....	vii
BAB I.....	1
P E N D A H U L U A N .....	1
1.1 Penjelasan Umum .....	3
1.2. Perubahan Tahun Dasar .....	7
BAB II.....	13
M E T O D E E S T I M A S I D A N.....	13
S U M B E R D A T A.....	13
2.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga .....	15
2.2 Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT).....	16
2.3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) .....	18
2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).....	20
2.5 Perubahan Inventori .....	21
2.6 Ekspor Impor .....	23
BAB III .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
T I N J A U A N.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
P E R E K O N O M I A N.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB III .....	27
P E M B A H A S A N D A N A N A L I S I S .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.1 Tinjauan Agregat PDRB Kota Tidore Kepulauan Menurut Pengeluaran.....	29
3.2 Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga.....	34
3.3 Perkembangan Konsumsi Akhir LNPRT.....	39
3.4 Perkembangan Konsumsi Akhir Pemerintah .....	40
3.5 Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).....	42
3.6 Perkembangan Perubahan Inventori .....	43
3.7 Perkembangan Net Ekspor Barang Dan Jasa.....	44
BAB IV .....	47
P E R K E M B A N G A N A G R E G A T P D R B M E N U R U T P E N G E L U A R A N K O T A T I D O R E K E P U L A U A N T A H U N 2 0 1 4 - 2 0 1 8.....	47
4.1 PDRB (Nominal) .....	49
4.2 Perbandingan Pengeluaran PDRB Untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga Terhadap Ekspor .....	50
4.3 Perbandingan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Terhadap PMTB.....	51
4.4 Proporsi Konsumsi Akhir Terhadap PDRB .....	51
4.5 PERBANDINGAN IMPOR TERHADAP PDRB.....	52
4.6 INCREMENTAL CAPITAL OUTPUT RATIO (ICOR).....	53

# Daftar Tabel

Tabel 1. PDRB ADHB Menurut Pengeluaran, Kota Tidore Kepulauan Tahun 2014-2018.....	29
Tabel 2. PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Tidore Kepulauan Tahun 2014-2018 .....	30
Tabel 3. Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran, Kota Tidore Kepulauan Tahun 2014 - 2018.....	31
Tabel 4. Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Tidore Kepulauan Tahun 2014 - 2018.....	32
Tabel 5. Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Kota Tidore Kepulauan, Tahun 2014 – 2018.....	34
Tabel 6. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kota Tidore Kepulauan, Tahun 2014—2018.....	35
Tabel 7. Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kota Tidore Kepulauan, Tahun 2014—2018.....	36
Tabel 8. Pertumbuhan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kota Tidore Kepulauan, Tahun 2014—2018.....	38
Tabel 9. Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kota Tidore Kepulauan, Tahun 2014—2018.....	39
Tabel 10. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi LNPRT Kota Tidore Kepulauan, Tahun 2014—2018.....	40
Tabel 11. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, Tahun 2014 – 2018.....	41
Tabel 12. Perkembangan dan Struktur PMTB Kota Tidore Kepulauan, Tahun 2014—2018.	42
Tabel 13. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kota Tidore Kepulauan, Tahun 2014—2018.....	44
Tabel 14. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kota Tidore Kepulauan, Tahun 2014—2018.....	49
Tabel 15. Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga Terhadap Ekspor Tahun 2014—2017.....	50
Tabel 16. Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB Tahun 2014—2018.....	51
Tabel 17. Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kota Tidore Kepulauan, Tahun 2014—2018.....	52
Tabel 19. Rasio Impor Terhadap PDRB Kota Tidore Kepulauan Tahun 2014—2018.....	52
Tabel 20. Incremental Capital Output Ratio, Kota Tidore Kepulauan, Tahun 2014 – 2018.....	54

# Daftar Gambar

Gambar 1. Perbandingan PDRB ADHB dan ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Tidore Kepulauan, Tahun 2014 – 2018.....	31
---	----

<https://tikepkota.bps.go.id>









# **BAB I**

# **P E N D A H U L U A N**

<https://tikepkota.bps.go.id>



## 1.1 Penjelasan Umum

Perencanaan pembangunan ekonomi suatu daerah membutuhkan data dan informasi guna tercapai perencanaan yang matang, terarah, dan sistematis. Salah satu data atau indikator yang berperan penting adalah produk domestik regional bruto (PDRB). PDRB adalah total nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan di suatu wilayah (regional) tertentu.

Penghitungan PDRB dapat dilakukan berdasarkan harga berlaku dan harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga tahun berjalan. PDRB ADHB dapat digunakan untuk memberikan informasi mengenai keadaan struktur ekonomi di suatu wilayah. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada suatu tahun tertentu, dalam publikasi ini digunakan tahun 2010. PDRB ADHK dapat digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi riil suatu perekonomian.

Terdapat tiga pendekatan yang biasanya digunakan dalam menghitung angka-angka PDRB, yaitu:

### a. Menurut Pendekatan Produksi

Menurut pendekatan ini, PDRB adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Pada praktiknya, untuk menghindari *double counting*, penghitungan PDRB jenis ini menggunakan total nilai tambah dari barang dan jasa dari masing-masing unit produksi. Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan usaha, yaitu: 1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, 2. Pertambangan dan Penggalian, 3. Industri Pengolahan, 4. Pengadaan Listrik dan Gas, 5. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang, 6. Konstruksi, 7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, 8. Transportasi dan Pergudangan, 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, 10. Informasi dan Komunikasi, 11. Jasa Keuangan dan Asuransi 12. *Real Estate*, 13. Jasa Perusahaan, 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib, 15. Jasa Pendidikan, 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, 17. Jasa lainnya. Setiap kategori lapangan usaha tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub kategori lapangan usaha.

### b. Menurut Pendekatan Pendapatan

PDRB menurut pendekatan ini merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan

gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam hal ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak atas produksi dan impor dikurangi subsidi). PDRB jenis ini belum dilakukan penghitungan mengingat keterbatasan data dan waktu yang ada.

### c. Menurut Pendekatan Pengeluaran

PDRB pada pendekatan ini adalah agregat pengeluaran komponen institusi ekonomi yang terdiri dari: (1) pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga, (2) pengeluaran konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah tangga, (3) pengeluaran konsumsi akhir pemerintah, (4) pembentukan modal tetap bruto, (5) perubahan inventori, dan (6) ekspor neto (ekspor dikurangi impor). PDRB pendekatan ini dapat memberikan informasi mengenai bagaimana kontribusi konsumsi dari masing-masing institusi ekonomi terhadap jalannya perekonomian suatu wilayah.

Dalam publikasi ini akan dijabarkan PDRB Kota Tidore Kepulauan dengan pendekatan Pengeluaran. Dengan melihat PDRB pendekatan pengeluaran akan dapat diketahui perilaku masyarakat dalam menggunakan pendapatannya, apakah hanya untuk tujuan konsumsi akhir atau juga investasi. Selain itu juga dapat diketahui besar ketergantungan ekonomi domestik (wilayah) terhadap wilayah lain dalam bentuk perdagangan barang dan jasa (transaksi eksternal).

Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tak langsung neto.

Produk Domestik Regional Bruto menurut pengeluaran (PDRB Pengeluaran) merupakan salah satu bentuk tampilan data ekonomi suatu wilayah, di samping bentuk tampilan lain seperti PDRB menurut lapangan usaha, Tabel *Input-Output*, Sistem Neraca Sosial Ekonomi, dan Neraca Arus Dana. Di dalam sistem kerangka kerja (*frame work*) data ekonomi suatu wilayah, PDRB Pengeluaran merupakan ukuran dasar (*basic measure*) yang menggambarkan Pengeluaran atas barang dan jasa (*product*) yang dihasilkan melalui aktivitas produksi. Dalam konteks ini, PDRB Pengeluaran itu menggambarkan hasil “akhir” dari proses produksi yang berlangsung dalam batas-batas teritori suatu wilayah. Berbagai jenis barang dan jasa akhir tersebut akan digunakan untuk memenuhi permintaan akhir oleh pelaku ekonomi domestik maupun pelaku ekonomi dari luar wilayah bahkan dari luar negeri. Beberapa agregat

penting dapat diturunkan dari PDRB Pengeluaran ini seperti variabel Pengeluaran Konsumsi Akhir, pembentukan modal tetap bruto atau investasi fisik, serta ekspor dan impor.

Penghitungan PDRB melalui pendekatan pengeluaran (*expenditure*) tidak terlepas dari penghitungan PDRB melalui pendekatan lapangan usaha (*production*). PDRB Pengeluaran diestimasi secara independen dengan menggunakan data dasar yang relatif berbeda. PDRB Produksi menggambarkan nilai agregat barang dan jasa yang dihasilkan suatu perekonomian. Sementara itu, PDRB Pengeluaran menggambarkan aktivitas konsumsi akhir dari barang dan jasa yang dihasilkan dari suatu perekonomian maupun dari luar (impor). Melalui hubungan ini, terlihat titik keseimbangan makro antara sisi penyediaan (*supply side*) dan sisi permintaan (*demand side*) barang dan jasa.

Adapun konsumsi akhir yang dimaksud dibagi menurut pelaku ekonominya meliputi: Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Nonprofit Yang Melayani Rumah tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori (PI), serta komponen Ekspor barang dan jasa. Secara konsep, penghitungan PDRB dari sisi yang berbeda di atas dimaksudkan untuk: i) memastikan konsistensi dan kelengkapan di dalam membuat estimasi; ii) memberi manfaat lebih di dalam melakukan analisis; dan iii) mengontrol kelayakan hasil estimasi. Secara teoritis, kedua pendekatan tersebut akan menghasilkan nilai yang sama besar (*equivalent*). Namun karena pendekatan estimasi dan metode pengukuran yang digunakan berbeda, maka akan muncul selisih statistik (*statistical discrepancy*).

Dalam menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi permintaan akhir masyarakat tersebut, tidak terlepas dari ketergantungan pada produk yang berasal dari dari luar wilayah atau luar negeri (impor). Berbagai barang dan jasa yang menjadi konsumsi akhir masyarakat di dalamnya akan terkandung produk impor. Sehingga dalam mengukur besarnya nilai tambah domestik (PDRB), komponen impor barang dan jasa harus dikeluarkan atau dikurangkan dari penghitungan konsumsi atau permintaan akhir. Tingginya permintaan tidak selalu diimbangi oleh penyediaan domestik, sehingga kondisi ini menjadi peluang bagi masuknya produk impor. Data empiris menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu, perdagangan produk impor terus berkembang baik secara kuantitas, nilai, maupun ragamnya.

Secara konsep, PDRB Produksi (Y) sama besar dengan PDRB Pengeluaran (E), namun dalam kenyataannya tidaklah demikian. Selain berbeda dalam struktur atau komposisi, pendekatan pengukuran antar keduanya juga berbeda. Dalam penyajian data PDRB, perbedaan ini diletakkan pada sisi PDRB Pengeluaran. Unsur yang menyebabkan perbedaan



tersebut antara lain adalah konsep dan basis pengukuran, metode dan cakupan pengukuran, serta data dasar yang digunakan untuk estimasi. Melalui penjelasan ini, para pengguna data PDRB tidak memperlmasalahkan adanya perbedaan (*statistical discrepancy*) tersebut.

Penyusunan data **PDRB Pengeluaran** juga dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana “pendapatan” (Y) yang tercipta melalui proses produksi menjadi sumber pendapatan masyarakat, yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir.

Dari sudut pandang lain, PDRB Pengeluaran juga menjelaskan Pengeluaran dari sebagian besar produk domestik bruto untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir, atau dengan istilah yang berbeda disebut sebagai “*output akhir (final output)*”. Mengkaitkan antara pendapatan dan pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa dari produk domestik maupun impor (termasuk untuk diekspor) merupakan bentuk analisis yang sederhana dari data PDRB. Keharusan memiliki jumlah yang sama pada kedua model pendekatan PDRB tersebut, secara simultan dapat ditunjukkan melalui model atau persamaan *Keynesian* sbb:

$$Y = C + GFCF + \Delta \text{ Inventori} + X - M$$

Y ( <i>Income</i> )	= PDRB Produksi
C ( <i>Consumption</i> )	= Konsumsi akhir
GFCF ( <i>Gross Fixed Capital Formation</i> )	= Pembentukan Modal Tetap Bruto
$\Delta$ Inventori	= Perubahan Inventori
X	= Ekspor
M	= Impor

Persamaan di atas menunjukkan pendapatan atau nilai tambah bruto dari hasil penghitungan PDRB Produksi akan “identik” dengan PDRB Pengeluaran. Jika Y adalah pendapatan, C adalah konsumsi akhir, dan *GFCF* serta  $\Delta$  Inventori merupakan bentuk investasi fisik, maka selisih antara ekspor dengan impor menggambarkan surplus atau defisit dari aktivitas perdagangan barang dan jasa antar wilayah, baik dengan wilayah lain ataupun dengan luar negeri.

Melalui pendekatan ini dapat diketahui perilaku masyarakat dalam menggunakan pendapatan, apakah hanya untuk tujuan konsumsi (akhir) atau juga untuk tujuan investasi (fisik). Selain itu juga dapat diketahui besarnya ketergantungan ekonomi wilayah (domestik) terhadap luar negeri dalam bentuk perdagangan internasional (*external transaction*). Selisih antara ekspor dan impor juga disebut sebagai “ekspor neto”.

Sebagaimana PDRB Produksi, dari PDRB Pengeluaran juga dapat diturunkan berbagai data agregat tentang perekonomian wilayah seperti nilai nominal, struktur atau distribusi pengeluaran konsumsi akhir, pertumbuhan “riil”, serta indeks harga implisit. Data yang dimaksud tersedia baik untuk masing-masing komponen PDRB Pengeluaran maupun untuk total perekonomian.

Dalam penghitungan PDRB, seluruh transaksi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi (unit rumah tangga, lembaga non-profit, pemerintah, perusahaan, dan luar negeri) harus dicatat secara konsisten dan sistematis, dengan menggunakan standar aturan dan akuntansi yang berlaku secara umum. Khusus untuk penghitungan PDB/PDRB, aturan dan akuntansi yang perlu diperhatikan adalah bahwa:

- Total *supply* (produk domestik/impor) dan Pengeluaran (domestik/ekspor) harus sama untuk setiap komoditas atau produk.
- Total *output* suatu industri harus sama dengan total input (*input* antara plus *input* faktor).
- Total penerimaan yang tercipta dalam suatu perekonomian domestik harus sama dengan *input* faktor yang digunakan dalam aktivitas produksi.

Selama ini, penghitungan PDB didasarkan pada Sistem Neraca Nasional Indonesia (SNNI) versi lama, yaitu SNNI yang didasarkan pada SNA 1968 dan SNA 1993. Sejalan dengan program perubahan tahun dasar PDB (dari tahun 2000 menjadi 2010) dan implementasi SNA 2008, penghitungan PDB menggunakan SNNI versi baru. Beberapa penyesuaian yang dilakukan Badan Pusat Statistik atas SNA 2008, tertuang di dalam sistem baru ini. Penyesuaian tersebut bersifat menyeluruh, mencakup penyesuaian dalam hal: konsep, definisi, cakupan, dan klasifikasi; metode penghitungan; dan sumber data yang digunakan. SNNI versi baru itu disebut sebagai SNNI 2010.

## **1.2. Perubahan Tahun Dasar**

### **Mengapa Tahun Dasar PDRB Perlu Diubah?**

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada kondisi perekonomian global maupun lokal, yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional, serta semakin meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan beberapa contoh perubahan yang perlu diantisipasi dalam mekanisme pencatatan data statistik nasional.

Satu bentuk implementasi dari *System of National Accounts (SNA)* adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB/PDRB. Di Indonesia kegiatan perubahan tahun dasar dari tahun 2000 ke 2010 dilakukan bersamaan dengan upaya mengimplementasi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam buku panduan SNA 2008. Kegiatan ini diawali dengan menyusun kerangka kerja dalam bentuk *Supply and Use Tables (SUT)* Indonesia untuk tahun data 2010. Dari kerangka SUT tersebut diperoleh nilai estimasi PDB dan komponen-komponennya. Selanjutnya nilai PDB maupun komponennya ini dijadikan sebagai acuan (*benchmark*) ketika BPS Provinsi maupun BPS Kabupaten/Kota menyusun PDRB-nya. Untuk itu, guna menjaga konsistensi dengan hasil penghitungan PDB, maka perubahan tahun dasar PDRB dilakukan secara simultan dengan perubahan tahun dasar PDB.

### **Apa yang Dimaksud dengan SNA 2008?**

SNA 2008 merupakan rekomendasi internasional tentang tata cara pengukuran aktivitas ekonomi, yang telah sesuai dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, cakupan, dan klasifikasi, serta aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur indikator ekonomi makro (*account*) seperti PDB/PDRB.

SNA dirancang guna menyediakan informasi tentang aktivitas yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi, utamanya aktivitas produksi, konsumsi, dan aktivitas akumulasi aset fisik. SNA dapat dimanfaatkan antara lain untuk kepentingan analisis, perencanaan dan penetapan kebijakan ekonomi. Melalui kerangka SNA, fenomena suatu perekonomian wilayah dapat dijelaskan dan dipahami dengan lebih baik.

### **Apa Manfaat Perubahan Tahun Dasar?**

Manfaat perubahan tahun dasar PDRB diantaranya adalah:

- a. Menginformasikan kondisi ekonomi terkini, seperti terjadinya perubahan struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- b. Meningkatkan kualitas PDRB;
- c. Menjadikan PDRB dapat diperbandingkan secara nasional.

### **Apa Implikasi Perubahan Tahun Dasar?**

Perubahan tahun dasar PDRB antara lain berdampak pada:

- a. Meningkatkan nilai PDRB, yang pada gilirannya berpengaruh pada perubahan kelompok pendapatan (dari wilayah berpendapatan rendah menjadi menengah atau tinggi), serta pergeseran struktur ekonomi;

- b. Perubahan besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan tabungan, neraca perdagangan, serta struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- c. Perubahan input data untuk keperluan *modeling* dan *forecasting*.

### **Mengapa Tahun 2010 sebagai tahun dasar?**

Terpilihnya tahun 2010 sebagai tahun dasar didasarkan atas beberapa alasan sbb:

- Perekonomian Indonesia pada tahun 2010 relatif stabil;
- Terjadinya perubahan struktur ekonomi Indonesia selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, terutama di bidang informasi, teknologi dan transportasi. Perubahan ini berpengaruh pada pola distribusi dan munculnya beberapa produk baru;
- Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar, yang harus dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun<sup>1</sup>;
- Adanya pembaharuan konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, sumber data, dan metodologi penghitungan sesuai rekomendasi SNA 2008;
- Tersedianya data dasar untuk meningkatkan kualitas PDRB seperti hasil Sensus Penduduk 2010 dan Indeks Harga Produsen (*Producers Price Index*);
- Tersedianya kerangka SUT Indonesia tahun 2010, yang menunjukkan keseimbangan antara produksi, konsumsi serta pendapatan yang tercipta dari aktivitas tersebut.

### **Implementasi SNA 2008 dalam PDRB tahun dasar 2010**

Terdapat 118 revisi di SNA 2008 dari SNA sebelumnya, dan 44 diantaranya merupakan revisi yang utama. Beberapa revisi yang diadopsi dalam penghitungan PDB/PDRB tahun dasar 2010 antara lain adalah:

- Konsep dan Cakupan
  - a. Sumber daya hayati (*cultivated biological resources/CBR*). *CBR* merupakan nilai aset alam hasil budidaya manusia, yang diperlakukan sebagai bagian dari *output* pertanian dan PMTB. Contoh nilai tegakan padi, kelapa sawit, dan karet yang belum dipanen, serta nilai sapi perah yang belum menghasilkan.
  - b. Sistem persenjataan (*military weapon systems/MWS*). *MWS* merupakan nilai pengeluaran pemerintah untuk pengadaan alat pertahanan dan keamanan, yang diperlakukan sebagai bagian dari *output* industri peralatan militer dan PMTB seperti pesawat tempur, kendaraan lapis baja, dan peluru kendali.

---

<sup>1</sup> SNA1993, para 16.76: "constant price series should not be allowed to run for more than five, or at the most, ten years without rebasing"

- c. Penelitian dan pengembangan (*research and development/RnD*). *RnD* merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas penelitian dan pengembangan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB seperti *RnD* tentang varietas padi, produk otomotif, dan riset pemasaran.
  - d. Eksplorasi dan evaluasi mineral (*mineral exploration and evaluation/MEE*). *MEE* merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah berhasil atau tidak menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.
  - e. Bank Sentral (*Central Bank/CB*). Aktivitas Bank Indonesia yang terkait dengan penyediaan jasa kebijakan moneter dan pengawasan dipisahkan dari jasa intermediasi keuangan. Aktivitas tersebut digabungkan dengan aktivitas penyediaan jasa regulasi yang dihasilkan pemerintahan.
  - f. Komputer software (*computer software and databases/CSD*). *CSD* merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunan *databases*, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
  - g. Produk kekayaan intelektual (*entertainment, literary or artistic originals/ELA*). *ELA* merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunannya, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
  - h. Pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah kegiatan tersebut berhasil ataupun tidak berhasil menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.
- Metodologi
 

*Output* jasa intermediasi keuangan. *Output* industri ini diestimasi dengan metode FISIM (*Financial intermediation services indirectly measured / FISIM*). *FISIM* dihitung berdasarkan tingkat suku bunga simpanan (*deposits*), bunga pinjaman (*loans*), dan suku bunga referensi (*reference*). Metode ini menggantikan metode *Imputed Bank Services Charge (IBSC)*.
  - Valuasi
 

Nilai tambah bruto lapangan usaha dinilai dengan harga dasar (*Basic Price*). Harga dasar merupakan harga keekonomian suatu barang atau jasa pada tingkat produsen, sebelum ada intervensi pemerintah dalam bentuk pajak dan subsidi atas produk.

- **Klasifikasi**

Klasifikasi yang digunakan adalah *Internasional Standard Industrial Classification* (ISIC rev.4) dan *Central Product Classification* (CPC rev.2). BPS mengadopsi kedua jenis klasifikasi tersebut menjadi KBLI 2009 dan KBKI 2010.

**Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2000 dan 2010**

PDRB Tahun Dasar 2000	PDRB Tahun Dasar 2010
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
4. Perubahan Inventori	4. Pembentukan Modal Tetap Bruto
5. Ekspor	5. Perubahan Inventori
6. Impor	6. Ekspor
	7. Impor



**BAB II**  
**METODE ESTIMASI DAN**  
**SUMBER DATA**

<https://tikepkou.bps.go.id>





## 2.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Pengeluaran konsumsi rumah tangga (PKRT) adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Dalam hal ini rumah tangga berfungsi sebagai pengguna akhir berbagai jenis barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. PKRT mencakup seluruh pengeluaran atas barang dan jasa oleh residen suatu wilayah, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik. Pengeluaran rumah tangga untuk keperluan biaya antara dan pembentukan modal di dalam aktivitas usaha rumah tangga, tidak termasuk dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga. Demikian juga pengeluaran untuk keperluan transfer baik dalam bentuk uang atau barang, tidak termasuk sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga. Berbagai jenis barang dan jasa yang dikonsumsi rumah tangga dapat diklasifikasikan ke dalam 12 *COICOP* (*Classification of Individual Consumption by Purpose*), antara lain:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
3. Pakaian dan alas kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. *Furniture*, perlengkapan rumah tangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

Namun dalam publikasi ini, PK-RT hanya disajikan dalam 7 *COICOP*, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok
2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Perelngkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya

Sumber data yang digunakan dalam penghitungan PKRT adalah:

- Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS
- Survei Khusus Konsumsi Rumah tangga Triwulanan (SKKRT), BPS
- Proyeksi Penduduk Hasil Sensus Penduduk 2010, BPS
- Data Sekunder (dari dalam maupun luar BPS)
- Indeks Harga Konsumen (IHK), BPS

### **Metode Penghitungan**

Komponen PK-RT Tahunan diestimasi dengan metode sbb:

1. Nilai pengeluaran konsumsi perkapita Susenas
2. Data poin 1 dikalikan dengan penduduk pertengahan tahun, dikalikan 12 (PKRT Tahunan)
3. Data poin 2 dikelompokkan menjadi 12 kelompok *COICOP*, dengan beberapa komoditas dikontrol secara tersendiri;
4. Terhadap data poin 3, dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan data sekunder atau data/indikator suplai;
5. Diperoleh nilai PK-RT Tahunan atas dasar harga berlaku;
6. Susun Indeks implisit PK-RT berdasarkan IHK Kota (provinsi/kota terdekat);
7. Nilai PK-RT atas dasar harga Konstan diperoleh dengan cara membagi hasil poin 5 dengan poin 6.

### **2.2 Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT)**

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri di dalam perekonomian suatu wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggota maupun bagi kelompok rumah tangga tertentu secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga yang ditawarkan di bawah tingkat harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Untuk diketahui, sesuai dengan fungsinya LNP dapat dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga (LNPRT) dan LNP yang melayani bukan rumah tangga.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggota atau rumah tangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota yang dimaksud bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial,

Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/ kebudayaan/olahraga/hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

Nilai PK-LNPRT sama dengan nilai output non pasar yang dihasilkan LNPRT. Output ini dihitung dari seluruh pengeluaran LNPRT untuk melakukan aktivitas operasionalnya. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari:

- a. Konsumsi antara, contoh: pembelian alat tulis, barang cetakan, pembayaran listrik, air, telepon, teleks, faksimili, biaya rapat, seminar, perjamuan, transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas, belanja barang dan jasa lain, sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dan lain-lain.
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh: upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lainnya
- c. Penyusutan
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dan lain-lain.

Sumber data yang digunakan dalam penghitungan PKLNPRT adalah:

- a. Survei Khusus Lembaga Nonprofit yang melayani Rumahtangga (SK-LNP), BPS
- b. SK-LNP Triwulanan (SK-LNPT), BPS
- c. Hasil *updating* direktori LNPRT, BPS
- d. Indeks Harga Konsumen, BPS

### **Metode Penghitungan**

Pada penghitungan PK-LNPRT atas dasar harga berlaku menggunakan asumsi bahwa lembaga ini tidak melakukan kegiatan ekonomis produktif, maka nilai PK-LNPRT sama dengan output atau biaya produksi yang dikeluarkan dalam rangka melakukan aktivitas pelayanan pada masyarakat, anggota organisasi, atau kelompok masyarakat tertentu. Biaya produksi LNPRT sama dengan nilai konsumsi (antara) ditambah biaya primer (kompensasi pegawai, penyusutan, dan pajak atas produksi lainnya). Biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan lembaga atas Pengeluaran barang dan jasa (antara) dan faktor produksi, ditambah nilai barang dan jasa yang berasal dari produksi sendiri atau pemberian pihak lain (*transfer*). Jika menggunakan *input* yang diperoleh secara cuma-cuma maka nilainya diperkirakan sesuai harga pasar yang berlaku.

PK-LNPRT diestimasi dengan metode sebagai berikut:

1. Nilai pengeluaran konsumsi per jenis lembaga dari hasil SK-LNP;
2. Hasil dari poin 1 dikalikan dengan banyaknya lembaga pada pertengahan tahun dari Direktori LNPRT;

3. Terhadap hasil poin 2 dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan indikator kegiatan hasil SK-LNP seperti jumlah tenaga kerja, penerima layanan, berbagai even seperti munas, rakerda, dan penanganan bencana;
4. Diperoleh nilai PK-LNPRT tahunan atas dasar harga berlaku (atas dasar harga Berlaku);
5. Susun Indeks implisit PK-LNPRT berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat);
6. Nilai PK-LNPRT atas dasar harga Konstan (ADHK) diperoleh dengan membagi hasil poin 4 dengan poin 5.

### **2.3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP)**

Unit pemerintah merupakan unit institusi yang terbentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang legislatif, yudikatif, dan eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas teritori suatu wilayah atau negara. Pemerintah juga berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi individu atau kelompok rumah tangga tertentu, pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, serta berfungsi untuk mendistribusikan pendapatan melalui aktivitas transfer. Dari sudut pandang lain, unit pemerintah terlibat dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah berperan sebagai konsumen maupun produsen barang dan jasa, serta sebagai regulator yang menetapkan kebijakan di bidang fiskal maupun moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah melakukan aktivitas produksi dan investasi.

Besarnya nilai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) sama dengan output pemerintah. Untuk itu PK-P mencakup pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran upah dan gaji pegawai, serta perkiraan penyusutan barang modal, dikurangi nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan unit produksi yang tak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan. Aktivitas yang dimaksud mencakup aktivitas:

1. Memproduksi barang yang sejenis dengan barang yang diproduksi unit perusahaan seperti publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, dan pembibitan tanaman di kebun percobaan. Aktivitas menghasilkan barang-barang semacam itu bersifat insidental dan di luar fungsi utama dari unit pemerintah.
2. Memproduksi jasa, seperti penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam praktek, pemerintah akan memungut biaya, namun umumnya biaya yang dikenakan tidak akan melebihi seluruh biaya yang dikeluarkan

pemerintah. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi atau pendapatan jasa.

Definisi ini sejalan dengan definisi dalam SNA 1968, yang menyebutkan bahwa pengeluaran konsumsi akhir pemerintah ekuivalen dengan nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh pemerintah untuk dikonsumsi sendiri.

Seluruh pengeluaran konsumsi pemerintah dapat diklasifikasikan menurut beberapa cara, yaitu:

- a. Berdasarkan apakah barang atau jasa diproduksi oleh produsen pasar atau non-pasar.
- b. Berdasarkan apakah pengeluaran tersebut merupakan pengeluaran kolektif atau individu.
- c. Berdasarkan fungsi (*COFOG / Classification of the Functions of Government*).
- d. Berdasarkan jenis barang dan jasa (*CPC / Central Product Classification*).

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) Kab/Kota mencakup: a. PK-Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan; b. PK-Pemerintah Provinsi yang merupakan bagian dari pemerintah Kab/Kota; c. PK-Pemerintah Pusat yang merupakan bagian dari pemerintah Kab/Kota; d. PK-Pemerintah Desa/Kelurahan/Nagari yang ada di wilayah Kab/Kota bersangkutan.

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi PK-P kabupaten/kota tahunan adalah:

- a. Data realisasi APBD Tahunan, Kementerian Keuangan dan Bappeda
- b. Statistik Keuangan Daerah, BPS
- c. Output Bank Indonesia, Bank Indonesia
- d. Gaji Pegawai Negeri Sipil, Kementerian Keuangan dan Bappeda
- e. Indeks Harga dan Indeks Upah, BPS
- f. Indeks perkembangan pengeluaran pemerintah daerah triwulanan, BPS

### Metode Penghitungan

- a. PK-P Kab/Kota ADH Berlaku

Secara umum, di dalam menghitung PK-P Kab/Kota adh Berlaku digunakan rumusan berikut:

$$\text{PK-P Kab/Kota adh Berlaku} = \text{Output non pasar} - \text{Penjualan barang dan jasa} + \text{Social Transfer in kind} + \text{Output Bank Indonesia}$$

Output non-pasar dihitung dengan pendekatan biaya yg dikeluarkan, seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja bantuan sosial, dan belanja lain-lain.

PK-P atas dasar harga Konstan diestimasi dengan men-*deflate* PK-P atas dasar harga Berlaku dengan menggunakan deflator berikut:

Jenis Belanja	Deflator	Keterangan
Belanja Pegawai	Indeks Upah	Sama dengan Nasional
Belanja Barang	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penyusutan	Indeks Implisit PMTB	
Belanja Bansos	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penerimaan barang dan jasa	IHK umum	Prov atau Kab/Kota terdekat
<i>Social Transfer in kind</i>	IHK umum	Prov atau Kab/Kota terdekat
<i>Output BI</i>		Neraca Jasa

## 2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi. Penambahan barang modal meliputi pengadaan, pembuatan, pembelian barang modal baru dari dalam negeri dan barang modal baru maupun bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal). Pengurangan barang modal meliputi penjualan transfer atau barter barang modal bekas kepada pihak lain.

PMTB menggambarkan penambahan dan pengurangan barang modal pada periode tertentu. Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun serta akan mengalami penyusutan sepanjang usia pakainya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan pada proses produksi secara normal selama satu periode. Secara umum barang modal diklasifikasikan menurut 4 golongan, yaitu: menurut jenis barang, menurut lapangan usaha, menurut institusi, dan menurut wilayah asal. Dalam penyusunan PDB/PDRB, PMTB dirinci menurut jenis barang modal.

Estimasi nilai PMTB dapat dilakukan melalui metode langsung maupun tidak langsung, dimana sangat tergantung pada ketersediaan data yang mungkin diperoleh di wilayah masing-masing. Pendekatan "langsung" adalah dengan cara menghitung pembentukan modal (harta tetap) yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi produksi (produsen) secara langsung. Sedangkan pendekatan "tidak langsung" adalah dengan menghitung berdasarkan alokasi dari total penyediaan produk (barang dan jasa) yang menjadi

barang modal pada berbagai sektor produksi, atau disebut juga sebagai pendekatan “ arus komoditas”. Penyediaan atau “supply” barang modal tersebut bisa berasal dari produk dalam negeri maupun produk luar negeri (impor).

### **Pendekatan Langsung**

Komponen PMTB diestimasi dengan menggunakan metode langsung ataupun metode tidak langsung tergantung ketersediaan data di masing-masing daerah.

PMTB atas dasar harga Berlaku (Domestik) = Barang Modal Domestik + TTM + Pajak atas Produk (PPN) + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga Berlaku (Impor) = Barang Modal Impor + TTM + Bea Impor + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga Konstan diperoleh dengan cara men-deflate PMTB atas dasar harga Berlaku dengan IHPB sbb:

$$PMTB_{ADHK} = \frac{PMTB_{ADHE}}{IHPB}$$

IHPB yang digunakan adalah IHPB Nasional (2010=100) sesuai jenis barang modal.

### **Pendekatan Tidak Langsung**

Pendekatan *Supply*: PMTB atas dasar harga Berlaku = Total Supply Barang x Rasio PMTB

Pendekatan Ekstrapolasi: PMTB atas dasar harga Konstan (t) = PMTB atas dasar harga (t-1) x Indeks Produksi (t)

## **2.5 Perubahan Inventori**

Inventori diartikan sebagai persediaan yaitu barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut menjadi barang dalam bentuk lain, yang mempunyai nilai ekonomi maupun nilai guna yang lebih tinggi. Termasuk pula barang yang masih dalam proses pengerjaan serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh pihak produsen. Sedangkan perubahan inventori merupakan selisih antara nilai inventori pada akhir periode akuntansi dengan nilai inventori pada awal periode akuntansi. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna pertambahan (tanda positif) atau pengurangan (tanda negatif).

Dalam aktivitas ekonomi, inventori berfungsi sebagai salah satu komponen yang dibutuhkan untuk keberlangsungan proses produksi selain tenaga kerja dan barang modal. Dalam PDRB perubahan inventori merupakan bagian dari pembentukan modal tetap bruto atau investasi fisik yang terjadi pada kurun waktu tertentu di dalam wilayah suatu region. Perubahan inventori menggambarkan bagian investasi yang realisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku, dan bahan penolong pada suatu periode tertentu.



Sehingga ketersediaan data perubahan inventori menjadi penting untuk kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang sebagai berikut:

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Inventori menurut jenis bahan baku & penolong (*material & supplies*), mencakup semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, mencakup barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yang mencakup barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai);
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau digunakan sebagai bahan bakar atau persediaan; serta
- h. Persediaan pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

### Metode Estimasi

Komponen Perubahan Inventori (PI) diestimasi dengan menggunakan metode revaluasi atau metode deflasi, tergantung jenis komoditasnya.

- a. Metode Revaluasi

Metode ini digunakan untuk komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan pertambangan.

$$\text{PI atas dasar harga Berlaku} = \text{Volume Inventori (t)} - \text{Volume Inventori (t-1)} \times \text{Harga per unit}$$
$$\text{PI atas dasar harga Konstan} = \text{PI atas dasar harga Berlaku} / \text{IHPB}$$

- b. Metode Deflasi

Metode ini digunakan untuk komoditas industri pengolahan dan komoditas lainnya.

$$\text{PI atas dasar harga Konstan} = \text{Inventori (t) atas dasar harga Berlaku/IHPB (t)} - \text{Inventori (t-1) atas dasar harga Berlaku/IHPB (t-1)}$$
$$\text{PI atas dasar harga Berlaku} = \text{PI atas dasar harga Konstan} \times \text{IHPB rata-rata (t)}$$

## 2.6 Ekspor Impor

Ekspor-impor kabupaten/kota didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (baik penjualan/pembelian, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dan jasa antara residen kabupaten/kota dengan non-residen yang berada di luar kabupaten/kota baik Indonesia maupun luar negeri (*United Nations*, 2009: 56).

### **Penghitungan Ekspor-Impor atas dasar harga berlaku**

Penghitungan ekspor-impor kabupaten/kota dengan metode tak langsung menggunakan metode *cross hauling*. Metode ini akan menghasilkan nilai ekspor-impor barang dan jasa di suatu kabupaten/kota. Metode ini bekerja dengan memanfaatkan sifat keseimbangan permintaan (*demand*) dan penyediaan (*supply*) setiap industri/komoditas di suatu perekonomian. Penghitung ekspor impor dengan metode *cross-hauling* diawali dengan metode *commodity balance*. Metode *commodity balance* adalah metode penghitungan ekspor-impor dengan memanfaatkan Tabel *Input-Output* “bayangan”. Dalam metode ini, transaksi ekspor-impor dipandang sebagai item penyeimbang (*balancing item*) untuk menuju kondisi demand dan supply yang seimbang di suatu perekonomian. Jika *supply* domestik suatu industri/komoditas di suatu kabupaten/kota melebihi kebutuhan (permintaan antara dan permintaan akhir), maka kabupaten/kota tersebut mengalami surplus dan akan melakukan ekspor. Sebaliknya, jika *supply* domestik komoditas di suatu kabupaten/kota tidak ada atau kurang, maka kabupaten/kota tersebut akan mengimpor (Kronenberg, 2008).

Asumsi yang digunakan dalam metode *commodity balance* adalah kelebihan dan kekurangan *supply* domestik atas *demand*, sepenuhnya diselesaikan dengan ekspor dan impor. Jika kelebihan *supply* domestik, maka akan melakukan ekspor, sedangkan jika kekurangan *supply* domestik, maka akan mengimpor. Hal ini membuat penghitungan ekspor-impor tersebut belum menangkap aspek lain di dalam transaksi ekspor-impor, karena dalam kenyataannya, baik dalam kondisi kelebihan atau kekurangan *supply* domestik, suatu kabupaten/kota dapat melakukan transaksi ekspor/impor secara bersama. Untuk mengatasi kelemahan ini, penghitungan ekspor-impor kabupaten/kota perlu untuk disempurnakan dengan menerapkan metode *cross hauling*. Metode *cross hauling* berusaha mengatasi kelemahan metode *commodity balance*, dengan mengakomodir kemungkinan suatu kabupaten/kota melakukan ekspor-impor komoditas secara bersamaan. Contoh, suatu kabupaten/kota, selain mengekspor komoditas pertanian ke luar daerah/luar negeri, juga melakukan impor komoditas pertanian yang merupakan output dari luar daerah/luar negeri. Penghitungan ekspor-impor kabupaten/kota menggunakan metode *commodity balance* dilakukan dengan cara sbb:

1. Menyusun struktur input masing-masing industri dengan bantuan Tabel I-O yang tersedia;
2. Mengalikan NTB menurut industri dengan rasio total input/output terhadap NTB;
3. Mengalikan struktur input pada dari poin (1) dengan output dari poin (2). Dari proses ini dihasilkan biaya antara, NTB, dan total input/output dalam Tabel I-O bayangan;
4. Menyusun struktur komponen permintaan akhir dengan bantuan Tabel I-O yang ada;
5. Mengalikan masing-masing komponen permintaan akhir dengan struktur dari poin (4);
6. Menghitung nilai ekspor neto (*trade balance*), yang merupakan selisih output (*supply domestik*) dengan permintaan domestik (*antara dan akhir domestik*). Jika net ekspor bernilai positif, diasumsikan terjadi ekspor, dan jika bernilai negatif diasumsikan terjadi impor;
7. Menjumlahkan nilai ekspor dan impor komoditas dari poin (7) untuk mendapat nilai ekspor dan impor.

Selanjutnya, untuk menghitung ekspor-impor kabupaten/kota dengan metode *cross hauling*, dilakukan langkah seperti langkah yang dilakukan dalam metode *commodity balance* di atas, namun hanya sampai langkah ke (6). Penyesuaian dilakukan untuk langkah ke (7), sehingga urutannya menjadi:

1. melakukan langkah (1) s.d (6) seperti pada *metode commodity balance*;
2. menghitung koefisien heterogenitas berdasarkan Tabel I-O data yang tersedia, yaitu *trade volume* dikurangi nilai absolut *trade balance*. Hasilnya dibagi dengan jumlah output, permintaan antara, dan permintaan akhir domestik;
3. menghitung besarnya volume perdagangan (*trade volume*), yaitu menjumlahkan nilai absolut *trade balance* dengan hasil perkalian antara koefisien heterogenitas dan jumlah output, permintaan antara, dan permintaan akhir domestik;
4. nilai impor setiap komoditas diperoleh dengan mengurangi *trade volume* dengan *trade balance*, hasilnya dibagi dua;
5. nilai ekspor setiap komoditas diperoleh dengan menjumlahkan *trade balance* dan impor;
6. menjumlahkan nilai ekspor dan impor per komoditas pada langkah (5) untuk mendapat nilai ekspor dan impor.

Metode *cross hauling* mengandalkan stuktur input dan permintaan akhir, nilai tambah per industri, serta permintaan akhir domestik per komponen, dan koefisien heterogenitas per komoditas yang didasarkan pada data yang tersedia dan hasil penghitungan sebelumnya. Penghitungan dengan metode *commodity balance* ini akan menghasilkan nilai ekspor-impor provinsi yang lebih rendah dibandingkan dengan metode *cross hauling*. Akurasi hasil

penghitungan setiap item akan menentukan akurasi nilai ekspor-impor provinsi. Oleh karena itu diperlukan upaya agar hasil penghitungan ekspor-impor kabupaten/kota ini berkualitas, dengan menyesuaikan struktur input dan permintaan akhir serta koefisien heterogenitas yang lebih sesuai dengan kondisi di Kabupaten/Kota untuk referensi penghitungan, dan melakukan pemeriksaan hasil penghitungan dengan membandingkan dengan berbagai data sekunder ekspor-impor yang relevan.

### **Penghitungan Ekspor-Import atas dasar harga konstan**

Penghitungan ekspor-impor antar kabupaten/kota adh konstan dilakukan dengan metode deflasi, dengan IHPB dan IHK sebagai deflator-nya. Karena indeks harga sebagai deflator tidak menggunakan tahun dasar 2010, maka sebelum digunakan, tahun dasar indeks harga tersebut harus digeser terlebih dahulu menjadi tahun 2010. Metode yang digunakan adalah yang dikenal dengan istilah *referencing*, yaitu nilai indeks pada tahun 2010 digeser menjadi 100,00; sedangkan periode lain digerakkan dengan perubahan indeks yang ada.



**BAB III**  
**TINJAUAN PEREKONOMIAN**  
**KOTA TIDORE KEPULAUAN**

<https://tikepkpa.go.id>



### 3.1 Tinjauan Agregat PDRB Kota Tidore Kepulauan Menurut Pengeluaran

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan total pengeluaran seluruh institusi ekonomi. Selama periode tahun 2014-2018 terus menunjukkan peningkatan dan pertumbuhan yang positif, peningkatan ekonomi tersebut digambarkan melalui nilai PDRB ADHB dan ADHK, serta pertumbuhannya pada total PDRB.

**Tabel 1. PDRB ADHB Menurut Pengeluaran, Kota Tidore Kepulauan Tahun 2014-2018**

*(Miliar Rp)*

Jenis Pengeluaran	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	1,013.87	1,117.46	1,235.77	1,335.42	1,465.32
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	24.49	30.71	29.71	34.20	43.00
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,700.10	1,928.22	2,076.58	2,237.31	2,421.59
Pembentukan Modal Tetap Bruto	402.59	447.02	522.84	608.93	667.45
Perubahan Inventori	17.06	(112.98)	20.76	5.08	(16.94)
Ekspor Barang dan Jasa	164.91	148.25	214.78	247.56	272.30
Dikurangi Impor Barang dan Jasa	1,455.07	1,475.83	1,844.05	2,017.35	2,178.78
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>	<b>1,867.95</b>	<b>2,082.85</b>	<b>2,256.38</b>	<b>2,451.14</b>	<b>2,673.94</b>

PDRB ADHB menunjukan total nilai konsumsi barang dan jasa residen dari suatu wilayah. Sehingga dari tabel di atas terlihat bahwa dari tahun ke tahun terdapat peningkatan nilai konsumsi barang dan jasa institusi ekonomi di Kota Tidore Kepulauan. Pada 2018 total nilai PDRB ADHB sebesar 2.673,94 miliar rupiah atau meningkat 9,09 persen dibandingkan periode sebelumnya. Namun peningkatan ini masih memasukan pengaruh peningkatan volume maupun perubahan harga barang/jasa.

Dari 7 (tujuh) komponen pengeluaran, komponen pengeluaran konsumsi pemerintah menjadi yang terbesar kontribusinya. Pada 2014, pengeluaran konsumsi pemerintah hanya sebesar 1.700,10 miliar rupiah, namun pada tahun 2018 sudah mencapai 2.673,94 miliar. Peningkatan ini salah satunya disebabkan adanya kontribusi pusat Pemerintahan Provinsi Maluku Utara di Kelurahan Sofifi, Oba Utara.

Selama periode 2014-2015 komponen ekspor barang dan jasa cenderung mengalami kondisi yang stagnan. Namun pada 2016 terdapat peningkatan yang cukup signifikan menjadi 214,78 miliar sebagai hasil dari meningkatnya arus komoditas akibat aktivitas perdagangan. Selanjutnya pada tahun 2017, pengoperasian tol laut cukup mampu mendorong ekspor barang dan jasa ke angka 247,56 miliar rupiah, lebih tinggi dibanding periode sebelumnya. Kemudian nilai tersebut terus meningkat menjadi 272,30 miliar rupiah pada 2018.



Peningkatan aktivitas perdagangan dan ketersediaan sarana tol laut juga mendorong terus tumbuhnya impor barang dan jasa di wilayah Tidore Kepulauan. Pada 2014, nilai impor barang dan jasa 1.455,07 miliar rupiah. Kemudian pada periode selanjutnya terus mengalami peningkatan hingga mencapai 2.178,78 miliar rupiah pada 2018. Hal tersebut menunjukkan arus komoditas masuk juga terus mengalami peningkatan seiring kebutuhan barang dan jasa yang semakin beragam. Nilai impor yang jauh lebih besar dari nilai ekspor menunjukkan adanya ketergantungan perekonomian terhadap *supply* barang dan jasa dari luar wilayah.

**Tabel 2. PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Tidore Kepulauan Tahun 2014-2018**

(Miliar Rp)

Jenis Pengeluaran	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	858.09	896.70	917.76	960.04	1,017.08
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	21.82	25.82	24.65	26.98	32.14
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,269.62	1,380.08	1,391.95	1,454.79	1,481.16
Pembentukan Modal Tetap Bruto	348.88	369.43	406.13	460.34	472.21
Perubahan Inventori	13.61	(111.16)	18.49	3.28	(10.63)
Ekspor Barang dan Jasa	163.98	159.26	141.25	147.28	155.31
Dikurangi Impor Barang dan Jasa	1,164.80	1,116.83	1,213.08	1,263.34	1,248.81
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>	<b>1,511.19</b>	<b>1,603.31</b>	<b>1,687.14</b>	<b>1,789.38</b>	<b>1,898.47</b>

Selain dihitung secara harga berlaku atau harga nominal, PDRB menurut pengeluaran juga dihitung ADHK tahun 2010. Sederhananya, berbagai pengeluaran dinilai dengan harga pada tahun 2010 sehingga lazim disebut nilai PDRB riil. Melalui perhitungan ADHK, PDRB di masing-masing tahun dapat memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau secara kuantitas saja, dengan menghilangkan pengaruh perubahan harga. Selain itu, PDRB ADHK dapat menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir. Secara umum gambaran tentang perkembangan ekonomi Kota Tidore Kepulauan dapat dilihat pada tabel 2 di atas. PDRB ADHK menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, semua komponen menunjukkan nilai yang positif kecuali pada komponen perubahan inventori yang cukup fluktuatif selama periode 2014 hingga 2018.

**Gambar 1. Perbandingan PDRB ADHB dan ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Tidore Kepulauan, Tahun 2014 – 2018**



Terbentuknya keseluruhan PDRB merupakan kontribusi dari komponen yang terdiri atas konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT), konsumsi akhir LNPRT (PK-LNPRT), konsumsi akhir pemerintah (PK-P), pembentukan modal tetap bruto (PMTB), ekspor neto (E) atau ekspor dikurangi impor. Pada tahun 2014, PDRB ADHB Kota Tidore Kepulauan hampir mencapai 1,87 triliun rupiah sedangkan ADHK sekitar 1,51 triliun rupiah. Kemudian pada 2015, PDRB Tidore Kepulauan ADHB mencapai 2,08 triliun rupiah sedangkan ADHK 1,60 triliun rupiah. Hal ini menunjukkan terjadi perubahan 11,50 persen ADHB dan 6,10 persen pada ADHK. Periode berikutnya, gap antara ADHB dan ADHK terus mengalami kenaikan sebagaimana terlihat dari nilai indeks implisit yang terus meningkat pada tabel 5. Peningkatan indeks implisit tersebut menunjukkan adanya peningkatan harga secara umum di Kota Tidore Kepulauan.

**Tabel 3. Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran, Kota Tidore Kepulauan Tahun 2014 - 2018**

*(Persen)*

Jenis Pengeluaran	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	54.28	53.65	54.77	54.48	54.80
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1.31	1.47	1.32	1.40	1.61
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	91.01	92.58	92.03	91.28	90.56
Pembentukan Modal Tetap Bruto	21.55	21.46	23.17	24.84	24.96
Perubahan Inventori	0.91	-5.42	0.92	0.21	-0.63
Ekspor Barang dan Jasa	8.83	7.12	9.52	10.10	10.18
Dikurangi Impor Barang dan Jasa	77.90	70.86	81.73	82.30	81.48
<b>PDRB</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

Berdasarkan tabel 3 terlihat bahwa selama periode 2014-2018, konsumsi agregat barang/jasa di wilayah Tidore Kepulauan sebagian besar berasal dari konsumsi akhir rumah tangga dan konsumsi pemerintah. Komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga menyumbang sekitar 54 persen konsumsi agregat barang dan jasa di wilayah Tidore Kepulauan. Proporsi konsumsi rumah tangga menunjukkan tren yang relatif stabil dari tahun 2014 hingga 2018.

Komponen pengeluaran konsumsi pemerintah mempunyai peranan yang paling besar dalam konsumsi akhir barang/jasa di wilayah Tidore Kepulauan. Sekitar 90 hingga 93 persen konsumsi agregat di Tidore Kepulauan di sumbang oleh konsumsi pemerintah selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Keberadaan kantor pemerintah provinsi di wilayah Tidore Kepulauan memengaruhi besarnya konsumsi pemerintah tersebut.

Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mempunyai peran yang relatif besar sekitar 21 sampai 25 persen. Dalam periode 5 tahun terakhir, perkembangan kontribusi komponen ini cenderung meningkat. Hal ini salah satunya didorong masifnya pembangunan sarana dan prasarana yang dilakukan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat di wilayah Kota Tidore Kepulauan. Selain itu, impor barang-barang modal untuk keperluan produksi yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta menjadi salah satu faktor pendorong lainnya.

Perubahan inventori mengambil peran sebesar 1 hingga 6 persen dibanding PDRB keseluruhan. Perdagangan antar wilayah yang dicerminkan melalui ekspor dan impor menunjukkan kecenderungan ekspor lebih rendah daripada impor. Hal tersebut disebabkan sebagian besar komoditi barang/jasa berasal dari luar wilayah Tidore Kepulauan.

**Tabel 4. Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Tidore Kepulauan Tahun 2014 - 2018**

Jenis Pengeluaran	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	3.84	4.50	2.35	4.61	5.94
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	9.03	18.32	-4.53	9.46	19.14
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	9.04	8.70	0.86	4.51	1.81
Pembentukan Modal Tetap Bruto	4.92	5.89	9.93	13.35	2.58
Ekspor Barang dan Jasa	-1.20	-2.87	-11.31	4.27	5.45
Dikurangi Impor Barang dan Jasa	18.60	-4.12	8.62	4.14	-1.15
<b>PDRB</b>	6.16	6.10	5.23	6.06	6.10

(Persen)

Indikator makro lain yang dapat diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi. Indikator ini biasa dijadikan dasar perencanaan dan evaluasi di bidang ekonomi. Selama 2014 hingga 2018 Kota Tidore Kepulauan memiliki pertumbuhan ekonomi yang selalu positif dan di atas 5 persen. Hal ini menjadi salah indikator pembangunan bidang ekonomi yang cukup baik.

Dalam periode 5 tahun terakhir, nilai pertumbuhan tertinggi terjadi pada periode 2014 yang mencapai 6,16 persen. Sementara itu, pada 2016 dimana pertumbuhan ekonomi Tidore Kepulauan melambat menjadi 5,23 persen yang merupakan pertumbuhan paling rendah dalam 5 tahun terakhir. Kemudian pada 2017 kembali terjadi percepatan pertumbuhan ekonomi menjadi 6,06 persen. Pada 2018, pertumbuhan ekonomi secara total sudah mencapai 6,10, lebih cepat dibanding periode sebelumnya.

Penyebab lain percepatan ekonomi pada 2017 dan 2018 adalah komponen pengeluaran konsumsi LNPRRT yang berakselerasi dari -4,53 persen pada 2016 menjadi 9,46 persen pada 2017 dan kembali meningkat 19,14 persen pada 2018. Percepatan ini diakibatkan LNPRRT di Tidore Kepulauan yang didominasi partai politik banyak melakukan pengeluaran konsumsi saat pemilihan kepala daerah serentak dan pemilihan umum.

Komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga juga tumbuh 5,94 persen, mengalami percepatan dibandingkan periode sebelumnya yang mencapai 4,61 persen. Konsumsi rumah tangga yang stabil merupakan salah satu modal berharga bagi suatu perekonomian. Kedepan menjadi tantangan *stakeholder* perekonomian di Tidore Kepulauan untuk terus meningkatkan peran konsumsi rumah tangga di wilayah ini.

Komponen ekspor barang dan jasa mengalami percepatan didorong perdagangan antar wilayah yang lebih mudah. Pada periode ini ekspor Tidore Kepulauan meningkat 5,45 persen, lebih cepat dibanding periode sebelumnya yang tumbuh 4,27 persen. Faktor ketersediaan tol laut dan upaya baik pemerintah melalui perusahaan daerah dan swasta melalui pengoptimalan barang-barang hasil kegiatan ekonomi di Tidore Kepulauan untuk dikirim keluar daerah.

Komponen pengeluaran konsumsi pemerintah mengalami perlambatan pertumbuhan ke angka 1,81 persen pada 2018. Kemudian komponen PMTB juga mengalami perlambatan pertumbuhan dibandingkan periode sebelumnya. Pada 2018 Pembentukan Modal Bruto di Tidore Kepulauan tumbuh 2,58 persen, tidak secepat pertumbuhan periode sebelumnya yang mencapai 13,35 persen. Perlambatan ini banyak didorong investasi dari sisi non bangunan yang tidak se besar periode sebelumnya.

**Tabel 5. Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Kota Tidore Kepulauan, Tahun 2014 – 2018**

(Persen)

Jenis Pengeluaran	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	118.16	124.62	134.65	139.10	144.07
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	112.25	118.95	120.52	126.75	133.77
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	133.91	139.72	149.18	153.79	163.49
Pembentukan Modal Tetap Bruto	115.39	121.00	128.74	132.28	141.35
Ekspor Barang dan Jasa	100.57	93.09	152.06	168.08	175.33
Dikurangi Impor Barang dan Jasa	124.92	132.14	152.01	159.68	174.47
<b>PDRB</b>	123.61	129.91	133.74	136.98	140.85

Indeks implisit pada PDRB Pengeluaran merupakan indeks yang menggambarkan tingkat perubahan harga yang terjadi pada sisi konsumen, baik konsumen akhir (rumah tangga, LNPRT, dan pemerintahan) maupun konsumen lainnya (perusahaan dan luar negeri). Tahun 2010 merupakan tahun yang digunakan sebagai tahun dasar penghitungan PDRB sehingga semua indeks pada tahun tersebut bernilai 100.

Kenaikan indeks implisit dapat dimaknai sebagai inflasi. Pada 2018, terdapat kenaikan indeks implisit sekitar 3 persen dibandingkan periode sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan kenaikan harga secara umum sekitar 3 persen di Tidore Kepulauan.

Indeks implisit cenderung akan mengalami kenaikan dari waktu ke waktu. Hal tersebut sejalan dengan terjadinya kenaikan harga pada level konsumen atau biasa dikenal inflasi. Besaran kenaikan indeks implisit juga biasanya tidak berbeda signifikan dengan besaran inflasi.

### 3.2 Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga

Konsumsi rumah tangga merupakan salah satu komponen pengeluaran yang memiliki proporsi cukup besar. Data pada tabel 6 di bawah menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2013 – 2017 konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan baik dalam nominal (ADHB) maupun riil (ADHK). Hal tersebut sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk maupun jumlah rumah tangga. Kenaikan jumlah penduduk mendorong terjadinya kenaikan nilai konsumsi rumah tangga, yang pada akhirnya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Secara rinci data perkembangan pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga dapat dilihat pada tabel 6.

**Tabel 6. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kota Tidore Kepulauan, Tahun 2014-2018**

<b>Uraian</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017*</b>	<b>2018**</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga					
a. ADHB (Juta Rp)	1,013,873.64	1,117,462.28	1,235,768.31	1,335,417.55	1,465,317.39
b. ADHK 2010 (Juta Rp)	858,085.50	896,703.30	917,758.07	960,043.82	1,017,080.05
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	54.28	53.65	54.77	54.48	54.80
Rata-rata konsumsi per-Rumah Tangga/tahun (Juta Rp)					
a. ADHB	50.02	54.47	59.49	63.55	68.99
b. ADHK 2010	42.33	43.71	44.18	45.69	47.88
Rata-rata konsumsi per-kapita/tahun (Juta Rp)					
a. ADHB	10.58	11.52	12.58	13.44	14.59
b. ADHK 2010	8.96	9.25	9.35	9.66	10.13
<u>Pertumbuhan<sup>[1]</sup></u>					
a. Total konsumsi Rumah Tangga		4.50	2.35	4.61	5.94
b. Per-Rumah Tangga		3.25	1.07	3.41	4.81
c. Perkapita		3.24	1.07	3.42	4.80
Jumlah Rumah Tangga (unit)	20,269	20,515	20,774	21,014	21,241
Jumlah penduduk (000 org)	95,813	96,979	98,206	99,337	100,415

Porsi atau pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB pada periode tahun 2014 s.d 2018 cenderung mengalami penurunan. Titik tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu 54.28 persen dan titik terendah terjadi pada tahun 2015 yaitu 53,65 persen. Hal tersebut diakibatkan semakin besarnya peran Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dalam PDRB.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga dalam PDRB menurut pengeluaran adalah total konsumsi individu terhadap barang dan jasa yang ada di suatu wilayah. Secara umum konsumsi akhir per rumah tangga terus meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2014, rata-rata konsumsi akhir rumah tangga per tahun sudah mencapai 92,16 juta rupiah sedangkan pada 2018 nilainya sudah mencapai 125,89 juta rupiah per rumah tangga per tahun.

<sup>1</sup> Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan/ADHK)

Pertumbuhan konsumsi akhir rumah tangga berkisar 2-6 persen dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada 2018 yaitu sebesar 5,94 persen. Sementara itu, rata-rata konsumsi per-kapita juga menunjukkan kecenderungan naik. Hal tersebut sejalan dengan pertumbuhan penduduk setiap tahunnya. Peningkatan rata-rata konsumsi per-kapita secara “riil” berkisar antara 1 s.d 5 persen. Peningkatan ini secara otomatis berpengaruh terhadap perubahan struktur konsumsi rumah tangga.

Secara total, pertumbuhan konsumsi rumah tangga ADHK tahun 2015 sebesar 4,5 persen. Selanjutnya cenderung mengalami perlambatan menjadi 2,35 persen pada periode 2016. Kemudian pada 2017 kembali mengalami percepatan menjadi 4,61. Pada periode terakhir yaitu tahun 2018 kembali mengalami percepatan menjadi 5,94 persen.

Sejalan dengan pertumbuhan konsumsi per rumah tangga, konsumsi per-kapita terus tumbuh dari 3,24 persen pada 2015. Namun pada 2016 pertumbuhannya sempat melambat menjadi 1,07 persen sebagai akibat dari perlambatan perekonomian secara umum. Sebelum kemudian kembali mengalami percepatan menjadi 3,42 persen karena perbaikan iklim perekonomian secara umum pada 2017. Kemudian kembali mempercepat pertumbuhannya ke angka 4,80 pada 2018. Nampak bahwa peningkatan keseluruhan konsumsi rumah tangga secara “riil” lebih tinggi dari peningkatan jumlah penduduk yang umumnya berada di bawah 2 persen.

Struktur pengeluaran permintaan akhir dapat menunjukkan komoditas barang/jasa yang banyak dikonsumsi oleh rumah tangga sebagai permintaan akhir. Dari informasi tersebut, pemerintah dapat menyusun skala prioritas penyediaan barang/jasa kebutuhan rumah tangga.

**Tabel 7. Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kota Tidore Kepulauan, Tahun 2014—2018**

Kelompok Konsumsi	2014	2015	2016	2017*	2018**	(Persen)
						(1)
Makanan, Minuman, dan Rokok	64.18	63.90	63.78	63.75	63.27	
Pakaian dan Alas Kaki	4.76	4.97	4.85	4.87	4.94	
Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	7.48	7.44	7.74	7.86	8.18	
Kesehatan dan Pendidikan	6.60	6.76	7.05	7.02	6.70	
Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	12.20	12.06	11.76	11.91	12.17	
Hotel dan Restoran	0.45	0.43	0.44	0.47	0.52	
Lainnya	4.33	4.45	4.40	4.11	4.21	
Total Konsumsi	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	

Secara rata-rata dari tahun 2014 s.d 2018, nampak pada struktur konsumsi akhir rumah tangga Indonesia, bahwa konsumsi makanan lebih tinggi dibandingkan konsumsi bukan makanan. Akan tetapi proporsi pengeluaran untuk makanan cenderung mengalami penurunan proporsi dari tahun ke tahun. Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel 7 di atas.

Komoditas makanan dan minuman dan rokok masih mendominasi total konsumsi masyarakat Tidore Kepulauan. Pada tahun 2014 kontribusi komoditas ini mencapai 64,18 persen, kemudian dari tahun ke tahun cenderung mengalami penurunan dan pada 2015 kontribusinya sudah turun ke 63,90 persen. Hingga terus mengalami penurunan dimana pada 2018 kontribusinya sebesar 63,27 persen. Hal tersebut menandakan adanya pergeseran konsumsi rumah tangga dari kebutuhan yang hanya terfokus pada makanan ke kebutuhan-kebutuhan lain seperti perumahan, kesehatan dan pendidikan, dan lain-lain. Dalam perekonomian, pergeseran pola konsumsi tersebut menandakan adanya perbaikan tingkat kesejahteraan meskipun prosesnya berjalan sangat lambat.

Porsi terbesar kedua pada komponen pengeluaran rumah tangga adalah untuk transportasi, komunikasi, rekreasi dan budaya dengan besaran 11-12 persen dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pada 2014, kelompok komoditas ini hanya menyumbang 12,20 persen dari total konsumsi rumah tangga. Kemudian cenderung mengalami fluktuasi hingga pada 2018 kontribusinya sebesar 12,17 persen.

Kelompok pengeluaran perumahan, perkakas, perlengkapan, dan penyelenggaraan rumah tangga serta kesehatan dan pendidikan juga cenderung mengalami kenaikan meskipun besaran kenaikannya belum signifikan. Komoditas perumahan, perkakas, perlengkapan, dan penyelenggaraan rumah tangga kontribusinya mencapai 8,18 persen pada tahun 2018. Meningkat dibandingkan 2014 yang hanya sebesar 7,48 persen. Sementara itu kontribusi sub komponen kesehatan dan pendidikan pada 2018 sebesar 6,70 persen. Kontribusi kelompok komoditas ini memang berkisar 6-7 persen dalam 5 tahun terakhir. Sedangkan kontribusi kelompok komoditas lain kontribusinya di bawah 5 persen.

Pola proporsi konsumsi di atas, menunjukkan tarik menarik antara kebutuhan rumah tangga atas makanan dan non makanan yang masih cukup kuat. Sungguhpun demikian, pengeluaran untuk kebutuhan non-makanan menjadi semakin penting sebagai akibat dari perubahan dan pengaruh tatanan ekonomi sosial dalam masyarakat. Pengeluaran tersebut di antaranya meliputi biaya untuk pendidikan, pembelian alat dan perlengkapan elektronik, pembelian alat transportasi, jasa komunikasi, jasa transportasi, jasa kesehatan, perjalanan wisata, restoran, sewa bangunan tempat tinggal, jasa hiburan dan sebagainya.



**Tabel 8. Pertumbuhan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kota Tidore Kepulauan, Tahun 2014-2018**

Kelompok Konsumsi	(Persen)				
	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Makanan, Minuman, dan Rokok	2.55	3.91	0.70	4.25	4.95
Pakaian dan Alas Kaki	5.68	7.46	4.80	6.84	7.47
Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	10.70	1.73	9.11	6.93	11.72
Kesehatan dan Pendidikan	5.38	7.40	5.24	4.80	2.73
Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	5.37	6.41	4.97	5.86	8.84
Hotel dan Restoran	3.24	2.69	7.05	12.39	14.47
Lainnya	6.27	5.76	3.25	-0.58	5.98

Dilihat dari pertumbuhan “riil” nya, pengeluaran rumah tangga cenderung positif. Hanya komoditas lainnya yang pada 2017 mengalami nilai pertumbuhan yang negatif. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pertumbuhan komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga akan cenderung meningkat karena adanya pertumbuhan penduduk dan juga pertumbuhan konsumsi penduduk itu sendiri.

Pertumbuhan kelompok makanan, minuman, dan rokok menunjukkan tren yang selalu positif. Pertumbuhan kelompok ini masing-masing sebesar 2,55 persen (2014); 3,91 persen (2015); 0,70 persen (2016); 4,25 persen (2017); dan 4,95 persen pada 2018. Sebagai kelompok komoditas yang bersifat pokok, wajar jika konsumsi kelompok komoditas ini akan cenderung terus meningkat.

Laju pertumbuhan sebagian besar komponen non makanan mengalami tumbuh positif selama kurun waktu lima tahun. Bahkan konsumsi rumah tangga untuk beberapa komoditas non makanan seperti pakaian dan alas kaki; perumahan, perkakas, perlengkapan dan penyelenggaraan rumah tangga; transportasi, komunikasi, rekreasi dan budaya; serta hotel dan restoran memiliki nilai pertumbuhan yang kuat dan positif. Pertumbuhan ini menunjukkan adanya perubahan konsumsi rumah tangga dalam bentuk kuantum (volume) dari waktu ke waktu.

Laju pertumbuhan kuantitas konsumsi ini juga yang mempengaruhi perubahan pola konsumsi masyarakat Tidore Kepulauan secara umum. Adanya fenomena peningkatan kuantitas konsumsi kelompok komoditas non makanan menyebabkan proporsi pengeluaran masyarakat dari kelompok komoditas makanan mengalami penurunan sedikit demi sedikit.

**Tabel 9. Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kota Tidore Kepulauan, Tahun 2014-2018**

(Persen)

Kelompok Konsumsi	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	2.47	5.60	9.60	3.62	3.76
b. Pakaian dan Alas Kaki	4.02	7.08	2.93	1.67	3.61
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	6.37	7.68	5.42	2.63	2.28
d. Kesehatan & Pendidikan	7.91	5.11	9.54	2.74	1.93
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	7.84	2.35	2.73	3.42	2.99
f. Hotel & Restoran	9.52	3.46	4.72	4.61	5.51
g. Lainnya	7.66	7.11	6.06	1.56	6.03

Sementara itu, tingkat perubahan harga yang secara implisit disajikan dalam tabel 9, menunjukkan pergerakan yang fluktuatif setiap tahunnya untuk setiap kelompok konsumsi. Perubahan indeks implisit ini juga dapat digunakan sebagai proksi inflasi tahunan yang terjadi di wilayah Tidore Kepulauan. Pertumbuhan harga untuk beberapa komoditas konsumsi rumah tangga pada 2 tahun terakhir relatif lebih rendah dibandingkan periode 2014-2016.

Besaran laju perubahan indeks implisit cenderung akan sejalan dengan besaran kenaikan harga atau biasa disebut inflasi di suatu daerah. Hal yang membedakan adalah bobot untuk setiap *basket commodity* karena perhitungan indeks implisit tidak menggunakan bobot hasil SBH melainkan rata-rata tertimbang untuk setiap komoditasnya.

### 3.3 Perkembangan Konsumsi Akhir LNPRT

Konsumsi LNPRT merupakan salah satu komponen yang penting dalam PDRB Pengeluaran. Fungsi ini merupakan salah satu *proxy* konsumsi (C dalam fungsi *keyneszian*) selain konsumsi rumah tangga. Karena dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat bukan hanya mengonsumsi barang/jasa yang mereka beli, tetapi ada juga yang mereka peroleh secara gratis/ dibawah harga pasar.

Konsumsi akhir LNPRT peranannya dalam PDRB menurut pengeluaran relatif kecil dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa peranan institusi ini dalam perekonomian Tidore kepulauan dapat lebih ditingkatkan lagi. Kondisi LNPRT di Tidore Kepulauan sendiri masih mati suri. Banyak LNPRT yang aktif hanya sesaat saja jika ada dana bantuan dari pemda. Data berikut menunjukkan hal tersebut, dapat dilihat dari proporsinya terhadap PDRB yang masih minor.

**Tabel 10. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi LNPRT Kota Tidore Kepulauan, Tahun 2014-2018**

Uraian	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT					
a. ADHB ( <i>Miliar Rp</i> )	24.49	30.71	29.71	34.20	43.00
b. ADHK 2010 ( <i>Miliar Rp</i> )	21.82	25.82	24.65	26.98	32.14
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	1.31	1.47	1.32	1.40	1.61
Pertumbuhan <sup>[1]</sup> (% ADHK 2010)	9.03	18.32	-4.53	9.46	19.14

Proporsi Pengeluaran LNPRT terhadap PDRB di Tidore Kepulauan hanya berkisar 1-1,6 persen. Sebagian pengeluaran pada komponen ini disumbang oleh aktivitas partai politik. Sementara itu, LNPRT lain seperti rumah ibadah, Satuan Lingkungan Setempat (SLS), perkumpulan sosial, dsb masih relatif kecil kontribusinya. Hal tersebut dapat kita cermati dari pola pertumbuhan komponen di bawah ini.

Komponen pengeluaran konsumsi LNPRT di Tidore Kepulauan memiliki pola pertumbuhan yang mengikuti musim politik yang terjadi. Pada 2015, komponen ini mengalami percepatan pertumbuhan karena adanya kegiatan pemilihan wali kota dan wakil wali kota di Tidore Kepulauan. Sementara 2 periode terakhir (2017-2018), adanya geliat pemilihan kepala daerah serentak serta persiapan dan pelaksanaan pemilihan umum sehingga pengeluaran LNPRT cenderung tumbuh positif dan besar.

Pada 2016 terjadi penurunan aktivitas politik sehingga pergerakan komponen pengeluaran LNPRT cenderung menurun. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai pertumbuhan yang negatif, yang menunjukkan penurunan aktivitas konsumsi dari LNPRT. Uraian di atas menunjukkan bagaimana besarnya peranan partai politik dalam menentukan besaran pengeluaran konsumsi LNPRT di wilayah Tidore Kepulauan

### 3.4 Perkembangan Konsumsi Akhir Pemerintah

Konsumsi akhir pemerintah bersama dengan pengeluaran akhir rumah tangga dan LNPRT merupakan jumlah dari konsumsi akhir dalam suatu perekonomian suatu wilayah. Peranan konsumsi pemerintah dalam perekonomian Kota Tidore Kepulauan serta bagaimana perkembangannya akan dijelaskan dalam uraian dibawah ini.

Konsumsi akhir pemerintah sebagai penyumbang terbesar dalam pengeluaran agregat di Tidore Kepulauan memegang peranan yang sangat penting. Namun besaran konsumsi akhir pemerintah ini belum mampu memberikan dorongan bagi pertumbuhan komponen lainnya.

**Tabel 11. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, Tahun 2014 – 2018**

Uraian	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. ADHB ( <i>Miliar Rp</i> )	1,700.10	1,928.22	2,076.58	2,237.31	2,421.59
b. ADHK 2010 ( <i>Miliar Rp</i> )	1,269.62	1,380.08	1,391.95	1,454.79	1,481.16
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	91.01	92.58	92.03	91.28	90.56
Pertumbuhan [1] (% ADHK 2010)	9.04	8.70	0.86	4.51	1.81

Secara total, pengeluaran konsumsi pemerintah menunjukkan peningkatan. Total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah di tahun 2018 ADHB sebesar 2,4216 triliun rupiah. Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah ADHK juga selalu mengalami peningkatan. Hal ini mengindikasikan bahwa secara riil telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah.

Kontribusi pengeluaran akhir pemerintah terhadap PDRB juga cenderung konsisten pada kisaran 90-92 persen dalam 5 tahun terakhir. Terlalu dominannya kontribusi komponen pengeluaran ini dibandingkan komponen lain menunjukkan belum efektifnya pengeluaran pemerintah dalam memberikan *impact* ke komponen lain.

Besarnya kontribusi pengeluaran konsumsi pemerintah berakibat pada ketergantungan perekonomian Tidore Kepulauan terhadap pergerakan komponen ini. Dapat dilihat pada 2016 ketika adanya perlambatan pertumbuhan konsumsi pemerintah, perekonomian secara umum juga ikut melambat. Sedangkan ketika konsumsi pemerintah kembali mengalami percepatan pada 2017, perekonomian secara umum juga kembali meningkat.

Dalam prakteknya, pengeluaran pemerintah seringkali dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik). Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk pelayanan publik, baik langsung maupun tidak langsung. Sehingga idealnya, konsumsi pemerintah dapat mendorong komponen lain untuk tumbuh. Namun fungsi tersebut belum berjalan efektif di Tidore Kepulauan.

Faktor tersebut juga didorong oleh pusat pemerintahan Provinsi yang ada di Kecamatan Oba Utara, sehingga berbagai belanja pemerintah seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dll lebih banyak dicairkan di Wilayah Tidore Kepulauan. Namun para pegawai lebih banyak menggunakan gaji/pendapatannya di wilayah Kota Ternate. Hal inilah yang mengakibatkan konsumsi pemerintah sangat tinggi namun konsumsi rumah tangganya jauh lebih rendah.

Sementara pada 2018 terjadi fenomena yang unik dimana pertumbuhan komponen pengeluaran konsumsi pemerintah yang melambat ke angka 1,81 persen namun perekonomian Tidore Kepulauan masih bisa tumbuh lebih cepat ke angka 6,10 persen. Hal tersebut ditolong pertumbuhan di komponen lain utamanya pengeluaran konsumsi LNPRRT dan pengeluaran konsumsi rumah tangga.

### 3.5 Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Dengan kata lain, dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital). Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai sektor. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor berupa barang modal baru maupun bekas.

**Tabel 12. Perkembangan dan Struktur PMTB Kota Tidore Kepulauan, Tahun 2014-2018**

Uraian	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Total PMTB</b>					
a. ADHB (Miliar Rp)	402.59	447.02	522.84	608.93	667.45
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	348.88	369.43	406.13	460.34	472.21
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	21.55	21.46	23.17	24.84	24.96
<b>Struktur PMTB</b>					
a. Bangunan (Miliar Rp)	265.34	297.02	342.02	402.77	438.12
(%)	65.91	66.44	65.42	66.14	65.64
b. Non Bangunan (Miliar Rp)	137.25	150.00	180.82	206.16	229.34
(%)	34.09	33.56	34.58	33.86	34.36
Total PMTB (Miliar Rp)	402.59	447.02	522.84	608.93	667.45
(%)	100	100	100	100	100
<b>Pertumbuhan (%)</b>					
a. Bangunan	4.93	6.97	13.67	17.24	5.22
b. Non Bangunan	4.91	3.93	2.94	5.30	-3.50
Total PMTB	4.92	5.89	9.93	13.35	2.58

Selain peningkatan yang terjadi pada komponen konsumsi akhir (rumah tangga maupun pemerintah), PMTB juga menunjukkan peningkatan baik secara nominal maupun riil. Hal

tersebut karena upaya peningkatan investasi merupakan salah satu prioritas nasional saat ini. Sehingga dari 2014 hingga 2018 terdapat peningkatan kontribusi PMTB. Pada 2014, kontribusi PMTB sebesar 21,55 persen kemudian menjadi 24,96 persen pada 2018.

Dari sisi pertumbuhan, setelah percepatan yang cukup masif pada periode 2016-2017, pertumbuhan pada tahun 2018 cenderung melambat. Dalam 2 periode tersebut, pertumbuhan komponen PMTB cukup besar yaitu 9,93 persen pada 2016 dan 13,35 persen pada 2017. Masih berlangsungnya pembangunan beberapa pabrik dan penyelesaian instalasi PLTU menjadi salah satu faktor penyebabnya. Sedangkan pada 2018 kebanyakan dari pembangunan tersebut sebagian besar sudah selesai sehingga pertumbuhan PMTB tidak secepat 2 periode sebelumnya yaitu 2,58 persen. Namun meskipun begitu PMTB masih dapat tumbuh positif dibanding periode sebelumnya karena adanya beberapa perbaikan sarana dan prasarana umum.

Pertumbuhan PMTB di Tidore Kepulauan secara umum masih didominasi penciptaan modal dari sub komponen Bangunan seperti jalan, jembatan, dan pabrik. Hal tersebut terlihat dari proporsi PMTB yang berupa bangunan menyumbang sekitar 65 persen dengan nilai pertumbuhan sekitar 5,22 persen di 2018

Sedangkan sub komponen Non Bangunan yang berupa mesin, peralatan, dll masih cukup kecil kontribusinya. Secara umum penciptaan barang modal Non bangunan di Tikep pada 2018 hanya sekitar 34 persen dari total PMTB. Selain itu, pertumbuhan yang hamper selalu di bawah pertumbuhan sub komponen bangunan membuat sub komponen ini masih kecil sumbangannya terhadap roda perekonomian secara total. Bahkan pada 2018 sub komponen ini tumbuh negatif pada -3,50 persen.

### **3.6 Perkembangan Perubahan Inventori**

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk “**persediaan**” berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud disini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif). Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

**Tabel 13. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kota Tidore Kepulauan, Tahun 2014-2018**

Uraian	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Total Nilai Inventori</b>					
a. ADHB ( <i>Miliar Rp</i> )	17.06	(112.98)	20.76	5.08	(16.94)
b. ADHK 2010 ( <i>Miliar Rp</i> )	13.61	(111.16)	18.49	3.28	(10.63)
<b>Proporsi terhadap PDRB</b> (% - ADHB)	0.91	-5.42	0.92	0.21	-0.63

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis cukup rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak dapat dikaji lebih dalam. Hal utama yang dapat dilihat dari komponen ini adalah bahwa proporsi dalam PDRB pada umumnya mempunyai besaran atau nilai yang berfluktuasi baik dalam level maupun tandanya (positif atau negatif).

Proporsi perubahan inventori terhadap PDRB Kota Tidore Kepulauan dalam kurun waktu 2014-2018 terus mengalami pola yang fluktuatif dari 0.91 persen di tahun 2014, kemudian pada 2018 nilainya menjadi -0.63. Fluktuasi ini diakibatkan adanya stok persediaan barang yang cukup dinamis. Nilai minus menandakan bahwa pada periode perekonomian yang bersangkutan nilai persediaan stok akhir lebih kecil dari stok awal.

### 3.7 Perkembangan Net Ekspor Barang Dan Jasa

Net ekspor antar daerah didefinisikan sebagai ekspor antar daerah dikurangi impor antar daerah. Berbeda dengan penghitungan ekspor-impor barang dan jasa luar negeri, pada penghitungan ekspor-impor antar daerah belum terdapat sumber data yang lengkap berkaitan dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Sumber data yang tersedia selama ini hanya menunjukkan adanya transaksi aktivitas barang dan jasa di Pelabuhan. Sedangkan aktivitas ekspor-impor yang dilakukan oleh residen melalui transaksi pribadi belum dapat tercatat dengan baik.

Keberadaan data dengan kondisi seperti ini menyebabkan penghitungan ekspor-impor antar provinsi menjadikan komponen ini (dalam series PDRB ADHK 2010) di *proxy* dengan perbedaan antara total PDRB menurut pengeluaran dengan total PDRB menurut lapangan

usaha. Ketersediaan data yang ada lebih sesuai untuk dimanfaatkan sebagai informasi pendukung.

Komponen ini secara implisit mencakup dua unsur pokok yaitu: ekspor antar daerah dan impor antar daerah. Sama halnya dengan perubahan inventori, net ekspor antar daerah juga hasilnya dapat memiliki 2 (dua) angka, positif atau negatif. Jika komponen ini bertanda “**positif**” berarti nilai ekspor antar daerah lebih besar dari pada impor antar daerah, demikian pula sebaliknya.

Pada saat ini untuk memisahkan net ekspor antar daerah menjadi nilai ekspor antar daerah dan nilai impor antar daerah dilakukan dengan metode tidak langsung, yaitu dengan metode *cross hauling*. Metode ini bekerja dengan memanfaatkan sifat keseimbangan permintaan (*demand*) dan penyediaan (*supply*) setiap komoditas di suatu perekonomian. Penghitung ekspor impor dengan metode *cross-hauling* diawali dengan metode *commodity balance*. Metode *commodity balance* adalah metode penghitungan ekspor-impor dengan memanfaatkan Tabel Input-Output yang tersedia. Dalam metode ini, transaksi ekspor-impor dipandang sebagai item penyeimbang (*balancing item*) dalam keseimbangan *demand* dan *supply* suatu perekonomian.





**BAB IV**  
**PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB**  
**MENURUT PENGELUARAN KOTA**  
**TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2014**  
**- 2018**

<https://tiketpub.com/914>



#### 4.1 PDRB (Nominal)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan agregat yang menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu wilayah ekonomi domestik, dimana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas”, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan.

Dari series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga, dan tenaga kerja). Sebagai contoh, untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, misalnya, maka disajikan data PDRB perkapita. PDRB per-kapita kota Tidore Kepulauan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun (tabel 14), seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Indonesia rata-rata mampu menciptakan PDRB atau (nilai tambah) sebesar nilai perkapita di masing-masing tahun tersebut.

**Tabel 14. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kota Tidore Kepulauan, Tahun 2014-2018**

<b>Uraian</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017*</b>	<b>2018**</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB ( <i>Miliar Rp</i> )					
- ADHB	1,867.95	2,082.85	2,256.38	2,451.14	2,673.94
- ADHK 2010	1,511.19	1,603.31	1,687.14	1,789.38	1,898.47
PDRB perkapita ( <i>Juta Rp</i> )					
- ADHB	19.50	21.48	22.98	24.67	26.63
- ADHK 2010	15.77	16.53	17.18	18.01	18.91
Pertumbuhan (persen)					
PDRB perkapita ADHK 2010		4.82	3.91	4.85	4.96
Jumlah penduduk ( <i>jiwa</i> )	95,813	96,979	98,206	99,337	100,415
Pertumbuhan Penduduk		1.22	1.27	1.15	1.09

Sementara itu pertumbuhan PDRB per-kapita secara “riil” berada di kisaran 3-4 persen. Pertumbuhan ekonomi tersebut sejalan pula dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang memiliki rata-rata 1,18 persen setiap tahunnya. Artinya pertumbuhan komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga selain didorong oleh pertumbuhan penduduk, juga ditopang oleh peningkatan konsumsi penduduk itu sendiri.

Dalam sebuah perekonomian negara berkembang, sangat penting bagi pemerintah untuk menjaga pertumbuhan tingkat konsumsi rumah tangga disamping terus mengupayakan peningkatan produksi perekonomian. Hal tersebut menjadi krusial dalam menjaga kestabilan *supply and demand* dalam jangka panjang.

Peran konsumsi rumah tangga juga sangat bermanfaat ketika terjadi krisis perekonomian. Pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan modal bagi suatu perekonomian untuk menghadapi krisis tersebut. Hal itu sudah terbukti ketika krisis 2007, Perekonomian Indonesia mampu bertahan karena dukungan konsumsi rumah tangga yang kuat.

Oleh karena itu, penting bagi Pemerintah Kota Tidore Kepulauan untuk memperhatikan bagaimana perkembangan konsumsi rumah tangga di wilayahnya. Selanjutnya akan disajikan beberapa ilustrasi perbandingan konsumsi rumah tangga berikut.

#### 4.2 Perbandingan Pengeluaran PDRB Untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga Terhadap Ekspor

Indikator ini menunjukkan perbandingan antara produk yang dikonsumsi RT di wilayah domestik dengan produk yang diekspor. Selama ini konsumsi rumah tangga mempunyai kontribusi yang sangat dominan dalam Pengeluaran PDB Indonesia (sekitar 60 persen), yang artinya bahwa seluruh produk yang dihasilkan di wilayah Indonesia sebagian besar digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga. Namun di dalamnya termasuk pula sebagian produk yang berasal dari impor.

**Tabel 15. Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga Terhadap Ekspor Tahun 2014-2017**

Uraian	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi RT (ADHB) (Juta Rp)	1,013.87	1,117.46	1,235.77	1,335.42	1,465.32
Total Ekspor (ADHB) (Juta Rp)	164.91	148.25	214.78	247.56	272.30
Perbandingan Konsumsi RT terhadap Ekspor	6.15	7.54	5.75	5.39	5.38

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2014, produk yang digunakan untuk konsumsi rumah tangga lebih dari 6,15 kali dari yang diekspor. Hal ini berarti bahwa sebagian besar penyediaan (*supply*) domestik diserap untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir

rumah tangga. Peningkatan rasio terjadi hingga 2015 memiliki perbandingan tertinggi (7,54 kali) jika dibandingkan periode lainnya. Kemudian pada periode 2016-2018 terus terjadi penurunan rasio, dimana pada 2018 rasinya menjadi 5,38 kali. Secara implisit data tersebut menjelaskan, bahwa nilai konsumsi akhir rumah tangga semakin menurun dan atau sebaliknya nilai ekspor semakin meningkat.

Peningkatan dan penurunan tersebut disebabkan oleh perubahan volume maupun harga. Selain itu, peningkatan yang relatif tajam juga disebabkan oleh perbedaan pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan ekspor.

#### 4.3 Perbandingan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Terhadap PMTB

Rasio ini merupakan perbandingan antara produk yang digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga dengan yang digunakan untuk investasi fisik (pembentukan modal tetap). Sekilas nampak bahwa sebagian besar Pengeluaran produk yang tersedia di wilayah domestik Indonesia digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga.

**Tabel 16. Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB Tahun 2014-2018**

<b>Uraian</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017*</b>	<b>2018**</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi RT (ADHB) (Juta Rp)	1,013.87	1,117.46	1,235.77	1,335.42	1,465.32
Total PMTB (ADHB) (Juta Rp)	402.59	447.02	522.84	608.93	667.45
Perbandingan Konsumsi RT terhadap Ekspor	2.52	2.50	2.36	2.19	2.20

Seperti halnya terhadap ekspor, rasio konsumsi rumah tangga terhadap PMTB berada pada kisaran 2,5-219. Terdapat tren penurunan rasio akibat pertumbuhan PMTB yang lebih cepat dibanding pertumbuhan konsumsi pengeluaran rumah tangga. Meskipun pada 2018 terjadi sedikit peningkatan rasio akibat perlambatan pertumbuhan PMTB.

#### 4.4 Proporsi Konsumsi Akhir Terhadap PDRB

Yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah Pengeluaran berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

**Tabel 17. Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kota Tidore Kepulauan, Tahun 2014-2018**

Uraian	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Konsumsi Akhir (ADHB)</b>					
<i>(Miliar Rp)</i>					
a. Rumah Tangga	1,013.87	1,117.46	1,235.77	1,335.42	1,465.32
b. LNPRT	24.49	30.71	29.71	34.20	43.00
c. Pemerintah	1,700.10	1,928.22	2,076.58	2,237.31	2,421.59
Jumlah	2,738.47	3,076.39	3,342.06	3,606.92	3,929.91
<b>PDRB (ADHB)</b>					
<i>(Miliar Rp)</i>					
	1,867.95	2,082.85	2,256.38	2,451.14	2,673.94
<b>Proporsi</b>	1.47	1.48	1.48	1.47	1.47

Semua barang dan jasa yang berada di wilayah domestik digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (lebih dari 100 persen). Besarnya nilai proporsi konsumsi akhir terhadap PDRB hamper 1,5 kali dikarenakan penggunaan konsumsi akhir belum mampu dipenuhi produk domestik melainkan juga bergantung pada produk impor.

#### 4.5 PERBANDINGAN IMPOR TERHADAP PDRB

Rasio ini memberikan gambaran tentang perbandingan antara produk yang berasal dari impor dengan produk yang dihasilkan di wilayah ekonomi domestik (PDRB). Selain itu data tersebut menjelaskan tentang ketergantungan PDRB terhadap produk yang dihasilkan oleh daerah lain. Jika rasionya besar berarti ketergantungan akan impor semakin tinggi, dan begitu juga terjadi sebaliknya.

**Tabel 18. Rasio Impor Terhadap PDRB Kota Tidore Kepulauan Tahun 2014-2018**

Uraian	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Impor (ADHB) (Miliar Rp)	1,455.07	1,475.83	1,844.05	2,017.35	2,178.78
Total PDRB (ADHB) (Miliar Rp)	1,867.95	2,082.85	2,256.38	2,451.14	2,673.94
Rasio Ekspor terhadap PMTB	0.78	0.71	0.82	0.82	0.81

Rasio impor terhadap PDRB tahun 2014 – 2018 menunjukkan pola yang stabil dalam kisaran 0,7-0,8 kali. Pada tahun 2014 rasio impor terhadap PDRB mencapai 0,78, hal ini bermakna sekitar 78 persen barang/jasa yang dikonsumsi residen Tidore Kepulauan berasal dari luar daerah. Kemudian periode selanjutnya terjadi pengurangan rasio menjadi 0,71.

Rasio terendah terjadi pada tahun 2015 (0,71), disebabkan peningkatan produk yang di hasilkan perekonomian Tidore Kepulauan, sehingga impor barang/jasa dari luar wilayah menurun. Hal tersebut menunjukkan berkurangnya ketergantungan PDRB terhadap produk impor. Sedangkan pada 2016, ketergantungan PDRB terhadap impor kembali meningkat. Hal ini terjadi akibat terjadinya perlambatan perekonomian secara umum.

Sementara itu, pada 2017 kembali terjadi peningkatan ketergantungan konsumsi terhadap produk impor. Rasio impor terhadap PDRB relatif sama dengan periode sebelumnya yang merupakan rasio terbesar dalam periode 5 tahun terakhir.

Dalam 2 periode terakhir, terlihat bahwa adanya kecenderungan peningkatan ketergantungan perekonomian Kota Tidore Kepulauan terhadap produk Impor. Hal tersebut diakibatkan adanya perlambatan pertumbuhan perekonomian yang terjadi pada 2016. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan domestik, dibutuhkan produk yang berasal dari luar daerah.

#### 4.6 INCREMENTAL CAPITAL OUTPUT RATIO (ICOR)

”*ICOR*” merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (*output*) melalui investasi tersebut. *ICOR* juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran).

Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi. Sedangkan output adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter PDRB.

Dengan menggunakan rasio ini, maka *ICOR* mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap penambahan output yang dihasilkan atau yang diartikan juga bahwa setiap pertambahan satu unit nilai output (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak ”K” unit. Formula:

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{I}{\Delta Y} = \frac{I_t}{Y_t - Y_{t-1}}$$

Dimana:

$I_t$  = PMTB tahun ke t

$Y_t$  = *Output* tahun ke t

$Y_{t-1}$  = *Output* tahun ke t-1



**Tabel 19. Incremental Capital Output Ratio, Kota Tidore Kepulauan, Tahun 2014 – 2018**

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
PDRB (ADHK 2010) (miliar rupiah)	1,423.44	1,511.19	1,603.31	1,687.14	1,789.38	1,898.47
Perubahan (miliar rupiah)		87.75	92.12	83.84	102.24	109.09
PMTB (ADHK 2010) (miliar Rp)		348.88	369.43	406.13	460.34	472.21
<i>ICOR</i>		3.98	4.01	4.84	4.50	4.33

Besaran *ICOR* Kota Tidore Kepulauan dalam 5 tahun terakhir berada dalam kisaran 3 hingga 4,5. *ICOR* Tidore Kepulauan cenderung meningkat dari tahun 2014 hingga 2016. Pada 2014, nilai *ICOR* sebesar 3,98, kemudian pada 2015 meningkat menjadi 4,01. Tahun 2016, *ICOR* Tidore Kepulauan terus mengalami peningkatan hingga mencapai 4,84. Kemudian pada periode selanjutnya kembali mengalami penurunan menjadi 4,50 pada 2017 dan 4,33 pada 2018.

Nilai *ICOR* pada 2017 mencapai 4,50 dapat dimaknai bahwa peningkatan PMTB di Tidore Kepulauan sebesar 1 miliar rupiah akan meningkatkan PDRB sebesar 4,50 miliar rupiah. Nilai *ICOR* yang cenderung meningkat di Tidore Kepulauan menunjukkan efisiensi Pengeluaran barang modal yang semakin baik. Hal ini menjadi potensi bagi perekonomian Tidore Kepulauan untuk terus mendorong peningkatan barang modal dalam rangka upaya peningkatan *output*. Dan juga sekaligus menjadi masukan bagi Pemerintah Kota Tidore Kepulauan apabila ingin mendorong terciptanya peningkatan PDRB Kota Tidore Kepulauan.



Sensus  
Penduduk  
2020

# DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KOTA TIDORE KEPULAUAN**

Jl. Sultan Syaifuddin, Gamtufkange, Tidore, 97812

Website: <https://tikepkota.bps.go.id> Telepon: (0921) 3161030